



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Indonesian National Committee
for Management of Social
Transformation Programme

Tantangan Pengembangan Riset-Riset Disabilitas dan berpengaruh pada Kebijakan

oleh:

Tri Nuke Pudjiastuti

Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST-UNESCO

Jakarta, 13 Desember 2021

KERANGKA UTAMA

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) diratifikasi melalui UU 19/2011
Tentang Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) diratifikasi melalui UU 12/2005
tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

The UN Universal Declaration of Human Rights diratifikasi melalui UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

leaving no one behind

Hal itu merefleksikan komitmen global Indonesia dan perhatian atas semua elemen bangsa untuk kemajuan hak azasi manusia, upaya pemenuhan hak para penyandang disabilitas dengan pendekatan interseksionalitas

PRIORITAS TARGET PADA



Target 3, 4 dan 5



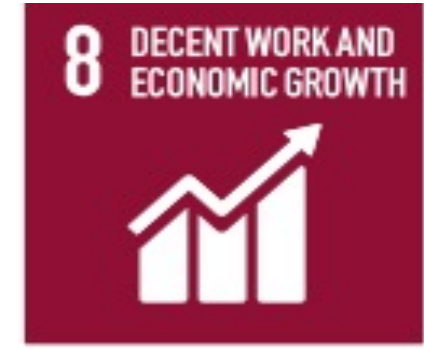
Target 8



Target 7



Target 1



Target 3 dan 5



Target 1



Target 3,4 dan 6



Target 3,7 dan 10



Target 16 dan 17

PEMENUHAN HAK DAN PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

#Envision2030: 17 goals to transform the world for persons with disabilities



Imagine the world in 2030, fully inclusive of persons with disabilities

In September 2015, the General Assembly adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development that includes 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Building on the principle of “leaving no one behind”, the new Agenda emphasizes a holistic approach to achieving sustainable development for all.

ISU DISABILITAS DI INDONESIA

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar 5% (BPS, 2020)

UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, membagi lima kategori disabilitas, yakni fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda/multi, yang menunjukkan kompleksitas masalah disabilitas.

Masih banyak penyandang disabilitas tidak mendapat akses pendidikan, selain persyaratan lahiriah yang sulit dipenuhi, juga tidak ramahnya infrastruktur di sekolah-sekolah tingkat dasar, menengah dan tinggi.



Meskipun telah ada 7 dari 8 PP yang dikeluarkan pemerintah, pusat studi, universitas dan lembaga internasional fokus pada isu disabilitas ternyata masih banyak tantangan akses sosial, pendidikan, ekonomi, politik

Sudah ada RANPD dan RINPD yang diharapkan dapat membangun masyarakat yang inklusif, namun membutuhkan langkah-langkah percepatan upaya pencapaiannya

isu disabilitas belum menjadi isu riset, sebagaimana isu-isu perekonomian, bencana ataupun gender

TANTANGAN

1. Pencapaian 17 Tujuan SDGs 2030 yang berperspektif disabilitas;
2. RANPD dan RINPD
3. Ekonomi bagi PD menjadi salah satu target Indonesia sebagai Pemimpin G-20

1. Isu disabilitas belum menjadi salah satu indikator dan perspektif dalam riset
2. Riset tidak menjadi bagian isu penting dalam RANPD maupun RINPD
3. Pendanaan riset nasional belum berperspektif disabilitas
4. Kelompok riset dalam lembaga kecenderungannya berjuang sendiri-sendiri sesuai dengan target lembaga/universitas

***stereotype* masih menjadi pembatas kesetaraan dan keadilan kesetaraan penyandang disabilitas**

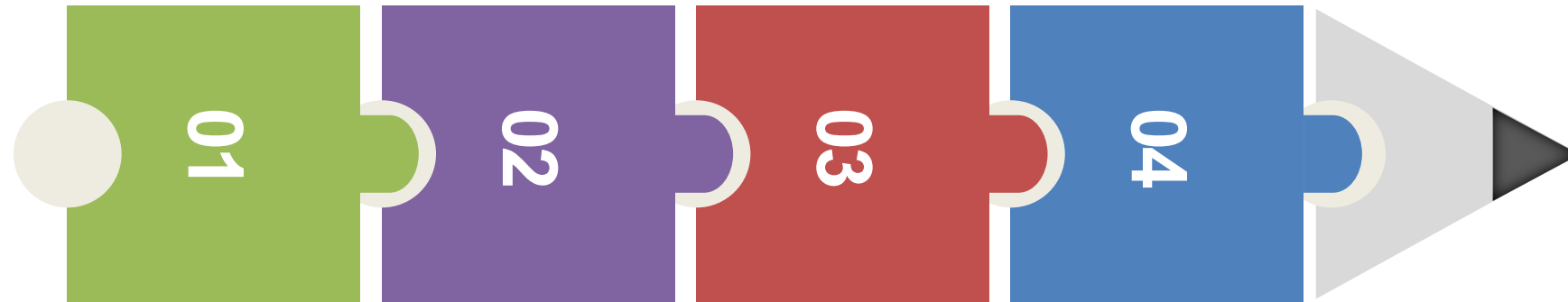
LANGKAH AWAL UNTUK PENGEMBANGAN RISET BERPERSPEKTIF DISABILITAS

Fokus prioritas

Menjadikan isu
disabilitas sebagai
salah satu fokus
dan prioritas

Pendokumentasian

Mengumpulkan,
mengelompokkan dan
mendokumentasikan
dan membangun pusat
data riset



Membangun komunikasi

Membangun komunikasi,
menyamakan
cara pandang

Mendesain kerja bareng

Mendesain sinergi
dan kolaborasi
rencana kerja
antar lembaga

Membangun
strategi
bersama guna
meningkatkan
perspektif
peneliti dan
riset disabilitas

MANDAT MOST INDONESIA DAN KOORDINASI

Mandat Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST-UNESCO merupakan:

- *intergovernmental committee*
- menghubungkan antara penelitian, kebijakan dan praktik
- mendorong dan mempromosikan penelitian ilmu sosial dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti (*science based policy*).

Riset berperan terjadinya pencapaian kesetaraan, keadilan dan pengarusutamaan disabilitas dalam kehidupan masyarakat dan bernegara di Indonesia

- Membangun TRUST: berkomunikasi, mendengarkan kebutuhan dan menyakinkan betapa pentingnya science based policy dalam penyusunan kebijakan, mengkomunikasikan rancangan kerja
- Rapat koordinasi – MENYATUKAN LANGKAH: Dewan Pengarah dan Komite

a.l. mendorong memasukkan riset disabilitas menjadi bagian dari prioritas riset nasional

***MOST SCHOOL* UNTUK MENCAPAI KNOWLEDGE TO POLICY**



- memastikan isu utama/prioritas
- memastikan kementerian/lembaga yang akan terlibat sejak awal
- pahami kekuatan masing-masing
- membangun jejaring multi pemerintah dan lembaga riset/universitas dan lembaga lainnya.
- **Jaringan itu bekerja bersama-sama untuk memastikan produksi pengetahuan yang relevan menjadi dasar penyusunan kebijakan.**
- mengawal pelaksanaan kebijakan
- menjaga kemitraan agar memudahkan monitoring dan evaluasi



Terima Kasih